



Rencana Kerja



2023



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Jl. Veteran No. 139 Telp. 0264-8224794 Purwakarta 41115

**PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (BNRI Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakartadan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LNRI Tahun 2007 Nomor 67, TLNRI Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2014 nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI 5679)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2208 Nomor 21, TLNRI Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

16. Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja DPMPTSP Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 2

Renja DPMPTSP Tahun 2023 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan berpedoman pada RKPD 2023.

Pasal 3

Renja DPMPTSP Tahun 2023 disusun dengan sistematika uraian sebagai berikut :

- a. Pendahuluan
- b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu
- c. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- d. Penutup

Pasal 4

Uraian Renja DPMPTSP Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Renja DPMPTSP Tahun 2023 berfungsi sebagai :

1. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023;
3. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pembangunan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Tanggal : Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.

NIP. 19790605 200501 1 013

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 telah kami selesaikan.

Dalam penyusunan RENJA ini mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD Kabupaten), Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah agar DPMPTSP memiliki dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP untuk mencapai Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Kami menyadari dalam penyusunan RENJA masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan penyusunan RENJA di masa yang akan datang.

Mudah-mudahan RENJA ini dapat memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijakan pada satu tahun anggaran kedepan.

Purwakarta, Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP.19790605 200501 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penyusunan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Purwakarta	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Dpmptsp Kab. Purwakarta	19
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	24
3.3 Program dan Kegiatan SKPD	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA	30
BAB V PENUTUP	46
KESESUAIAN DENGAN RKPD TAHUN 2023	iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk memilah dan memilih alternatif-alternatif pilihan, kemudian menentukan alternatif mana yang paling tepat dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) disebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Perencanaan pembangunan di daerah merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait lainnya dalam merumuskan arah kebijakan, strategi dan prioritas program dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan (Dadang Solihin, 2005).

Pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang sistematis dan akurat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah serta dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Perencanaan yang sistematis akan

sangat membantu dalam proses kontrol, membantu mengantisipasi masalah sehingga jika ditemukan ketidaksesuaian bisa segera dilakukan evaluasi dengan baik, cepat dan jelas.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memerlukan suatu penyusunan perencanaan terlebih dahulu melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian dilanjutkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Dalam lingkup perangkat daerah, dokumen perencanaan yang dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program Kepala daerah yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran konkrit dan bersifat operasional dari RPJMD sesuai dengan Tupoksi perangkat daerah yang bersangkutan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Agar penyusunan rencana strategis termasuk perumusan program dan kegiatan di dalamnya terukur dengan sasaran yang jelas dan konkrit. Maka diperlukan dokumen perencanaan tahunan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dan melakukan evaluasi atas kinerja perangkat daerah setiap tahunnya berupa Rencana Kerja perangkat daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) sehingga penyusunannya berpedoman pada Renstra SKPD serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang berfungsi menjabarkan, menerjemahkan serta mengoperasionalkan Renstra DPMPTSP 2018-2023 serta RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ke dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun ke depan yang memuat potensi, peluang dan kendala yang ada dengan tetap memperhatikan keterpaduan dan keterkaitan antara perencanaan, penetapan program dan penganggaran dengan dokumen perencanaan strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;

- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
- 18) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 19) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 20) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 21) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 152 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 22) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dimaksudkan sebagai arah dan pedoman untuk menjabarkan perencanaan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Purwakarta selama satu tahun anggaran 2023 yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta sebagai bahan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini adalah untuk:

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Rencana Strategis DPMPTSP;
- 2) Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 3) Menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kab. Purwakarta Tahun 2021 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Purwakarta
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kab. Purwakarta
	2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPM PTSP Kab. Purwakarta
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kab. Purwakarta Tahun 2021 dan Capaian Renstra DPMPTSP

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purwakarta berpedoman kepada Sasaran, indikator kinerja utama (IKU), program dan kegiatan yang tercantum pada dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2016 tentang tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan tujuan perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2018-2023 yaitu "**Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif**". Untuk mewujudkan tujuan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta didukung oleh 2 (dua) Sasaran yaitu :

Sasaran Pertama,

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN.

Indikator : Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Dengan target kinerja pada Tahun 2023 adalah sebesar 75 Triliun.

Sasaran Kedua,

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal.

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan target kinerja pada Tahun 2023 adalah sebesar 82,50.

Pada tahun 2021 telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran, dengan realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Capaian Kinerja Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	HASIL	KET
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	65 Triliun	74,49 Triliun	Tercapai 114,6 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,40	87,78	Tercapai 106,5 %

Sumber : LAKIP DPMPTSP, Tahun 2021.

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 2 indikator yang diukur pada Tahun 2021, semuanya melebihi target, Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dengan ketercapaian sebesar 114,6% dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan ketercapaian sebesar 106,5%.

Pencapaian terhadap target kinerja sasaran sebagaimana telah disebutkan bukan berarti tanpa hambatan, adapun permasalahan dalam penanaman modal dan perijinan yang masih terjadi dan menjadi kendala dalam peningkatan kinerja DPMPTSP tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a) Data potensi investasi yang tersedia kurang memadai.
- b) Implementasi insentif dan fasilitasi penanaman modal belum terwujud.
- c) Pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital belum maksimal.
- d) Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya di Kabupaten Purwakarta.
- e) Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam bidang teknologi informasi dan teknis perizinan.
- f) SOP dan Standar pelayanan masih belum up to date sesuai dengan jumlah jenis layanan.
- g) Terkait dengan Tim Teknis yang mempunyai kewenangan atas penerbitan perizinan yang memerlukan rekomendasi, prosesnya masih di masing-masing perangkat daerah dan belum di delegasikan kepada Tim Teknis yang merupakan bagian dari DPMPTSP.

Permasalahan tersebut menjadi masukan serta acuan dalam penyusunan rencana kerja di Tahun 2023 ini sehingga dapat terakomodir dalam program dan kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan berdasarkan tingkat pencapaian Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta atas realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Kode	Perangkat Daerah/Bidang Urusan Program/Kegiatan	Indikator (sesuai RPJMD dan DFA)	Lokasi		APBD Perubahan Tahun 2021 (sesuai DPA)		Lokasi	Realisasi Triwulan IV Tahun 2021		Selisih	Catatan Permasalahan
			4	5	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6-9)	11	12
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				14.274.731.087			13.280.419.332	994.311.755	93,03	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.361.575.372			11.525.333.800	836.341.572	93,23	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	52.497.918	Kab. Purwakarta	100,0%	39.746.500	12.751.418	75,71	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	29.999.642	Kab. Purwakarta	100,0%	22.049.000	7.950.642	73,50	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	7.498.938	Kab. Purwakarta	100,0%	6.962.000	536.938	92,84	

2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	14.999.338	Kab. Purwakarta	100,0%	10.735.500	4.263.838	71,57
2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	7.249.683.559	Kab. Purwakarta	100,0%	6.753.651.376	496.032.183	93,16
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	7.234.686.255		100,0%	6.738.655.776	496.030.479	93,14
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	7.497.689	Kab. Purwakarta	100,0%	7.496.500	1.189	99,98
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	7.499.615	Kab. Purwakarta	100,0%	7.499.100	515	99,99
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	10.000.000	Kab. Purwakarta	100%	9.640.000	360.000	96,40
2.18.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	-	Kab. Purwakarta	100,0%	-	-	#DIV/0!
2.18.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	10.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	9.640.000	360.000	96,40

2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	374.233.711	Kab.Purwakarta	100,0%	373.271.711	962.000	99,74
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	174.233.711	Kab.Purwakarta	100,0%	173.929.711	304.000	99,83
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	200.000.000	Kab.Purwakarta	100,0%	199.342.000	658.000	99,67
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	624.977.413	Kab.Purwakarta	100%	582.557.600	42.419.813	93,21
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	58.780.334	Kab.Purwakarta	100,0%	58.756.500	23.834	99,96
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100,0 %	43.563.152	Kab.Purwakarta	100,0%	43.453.500	109.652	99,75
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100,0 %	315.897.254	Kab.Purwakarta	100,0%	309.230.350	6.666.904	97,89
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100,0 %	87.514.599	Kab.Purwakarta	100,0%	83.064.600	4.449.999	94,92

2.18.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Penuhuan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100,0 %	6.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	-	6.000.000	-
2.18.01.2. 06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Penuhuan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0 %	50.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	43.050.000	6.950.000	86,10
2.18.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Penuhuan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0 %	50.114.000	Kab. Purwakarta	100,0%	31.903.500	18.210.500	63,66
2.18.01.2. 06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Penuhuan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0 %	13.108.074	Kab. Purwakarta	100,0%	13.099.150	8.924	99,93
2.18.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Penuhuan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0 %	202.000.000	Kab. Purwakarta	100%	201.919.500	80.500	99,96
2.18.01.2. 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Penuhuan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0 %	-	Kab. Purwakarta	100,0%	-	-	#DIV/0!
2.18.01.2. 07.05	Pengadaan Mebel(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Penuhuan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0 %	151.750.000	Kab. Purwakarta	100,0%	151.685.500	64.500	99,96
2.18.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Penuhuan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0 %	50.250.000	Kab. Purwakarta	100,0%	50.234.000	16.000	99,97

2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100,0 %	2.306.022.771	Kab.Purwakarta	100%	2.127.701.202	178.321.569	92,27
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100,0 %	6.600.000	Kab.Purwakarta	100,0%	6.600.000	-	100,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100,0 %	614.198.870	Kab.Purwakarta	100,0%	476.603.134	137.595.736	77,60
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100,0 %	1.685.223.901	Kab.Purwakarta	100,0%	1.644.498.068	40.725.833	97,58
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100,0 %	1.542.260.000	Kab.Purwakarta	100%	1.436.845.911	105.414.089	93,16
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100,0 %	156.750.000	Kab.Purwakarta	100,0%	61.677.661	95.072.339	39,35
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100,0 %	-	Kab.Purwakarta	100,0%	-	-	#DIV/0!
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100,0 %	75.010.000	Kab.Purwakarta	100,0%	74.441.000	569.000	99,24

2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0 %	600.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	599.370.000	630.000	99,90
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0 %	710.500.000	Kab. Purwakarta	100,0%	701.357.250	9.142.750	98,71
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				424.996.760			415.671.586	9.325.174	97,81
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab. Purwakarta	100,0 %	349.999.912	Kab. Purwakarta	100,0%	347.831.836	2.168.076	99,38
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab. Purwakarta	100,0 %	349.999.912	Kab. Purwakarta	100,0%	347.831.836	2.168.076	99,38
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab. Purwakarta	100,0 %	74.996.848	Kab. Purwakarta	100,0%	67.839.750	7.157.098	90,46
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab. Purwakarta	100,0 %	74.996.848	Kab. Purwakarta	100,0%	67.839.750	7.157.098	90,46
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				135.118.902			103.804.335	31.314.567	76,82
2.18.02.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab. Purwakarta	100,0 %	135.118.902	Kab. Purwakarta	100,0%	103.804.335	31.314.567	76,82
2.18.02.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab. Purwakarta	100,0 %	49.997.684	Kab. Purwakarta	100,0%	30.840.350	19.157.334	61,68

2.18.02.03 2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab. Purwakarta	100,0 %	85.121.218	Kab. Purwakarta	72.963.985	12.157.233	85,72
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Kab. Purwakarta		349.814.362	Kab. Purwakarta	291.800.800	58.013.562	83,42
2.18.04.2. 01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	100,0 %	349.814.362	Kab. Purwakarta	291.800.800	58.013.562	83,42
2.18.04.2. 01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	100,0 %	179.814.838	Kab. Purwakarta	143.629.200	36.185.638	79,88
2.18.04.2. 01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	100,0 %	60.690.536	Kab. Purwakarta	40.868.300	19.822.236	67,34
2.18.04.2. 01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	100,0 %	91.395.185	Kab. Purwakarta	89.390.200	2.004.985	97,81
2.18.04.2. 01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas /Insentif Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	100,0 %	17.913.803	Kab. Purwakarta	17.913.100	703	100,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				403.129.046		346.443.192	57.685.854	85,69
2.18.05.2. 01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab. Purwakarta	100,0 %	403.129.046	Kab. Purwakarta	345.443.192	57.685.854	85,69
2.18.05.2. 01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab. Purwakarta	100,0 %	50.819.783	Kab. Purwakarta	46.666.283	4.153.500	91,83

2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab. Purwakarta	100,0 %	227.261.944	Kab. Purwakarta	100,0%	225.613.944	1.648.000	99,27
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab. Purwakarta	100,0 %	125.047.319	Kab. Purwakarta	100,0%	73.162.965	51.884.354	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				599.996.645			598.365.619	1.631.026	99,73
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Kab. Purwakarta	100,0 %	599.996.645	Kab. Purwakarta	100,0%	598.365.619	1.631.026	99,73
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Kab. Purwakarta	100%	599.996.645	Kab. Purwakarta	100,0%	598.365.619	1.631.026	99,73

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2021, sesuai dengan dokumen Perencanaan Strategis 2018 -2023 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja mempunyai Tujuan yaitu Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif dan meliputi 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

Dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purwakarta, kebijakan penanaman modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta diarahkan kepada ketersediaan informasi yang jelas dan akurat tentang peluang potensi investasi. Sarana informasi peluang investasi berupa buku potensi unggulan dan buku peluang potensi investasi untuk menyebarkan informasi tersebut, salah satu media untuk menyebarkan informasi investasi tersebut dengan berperan serta pada event Pameran Investasi Dalam Negeri dengan harapan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di berbagai sektor, diantaranya sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, pertambangan, agri bisnis maupun industri di Kabupaten Purwakarta.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan hasil dari evaluasi kinerja dan penilaian mandiri lainnya atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2021, maka terdapat isu-isu strategis yang dapat diamati terkait dengan manfaat dan pengaruhnya di masa yang akan datang terhadap peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, antara lain sebagai berikut :

3. Realisasi investasi PMA yang lebih menonjol dibandingkan dengan investasi PMDN;
4. Gap yang tinggi antara minat investasi dan realisasi investasi;
5. Potensi/Peluang investasi belum memiliki Feasibility Study (FS);
6. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
7. Belum adanya kebijakan insentif bagi penanam modal di Kabupaten Purwakarta;
8. Digitalisasi promosi investasi Kabupaten Purwakarta;
9. Pelayanan perizinan secara online dan terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik;
10. Minimnya keterikatan pelayanan dengan perangkat daerah lain dalam hal teknis perizinan;
11. Sinkronisasi regulasi perizinan antara Pusat dan Daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2023 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Pada tahun 2023 program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purwakarta mengalami perubahan nomenklatur yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kab. Purwakarta serta dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023, yang kemudian akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Kab. Purwakarta sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif dijadikan rencana kerja tahun 2023.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2020 – 2024 yang merupakan tema pembangunan tahun 2020 – 2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM telah menetapkan dua arah kebijakan dan startegi yang akan dilakukan pada masingmasing arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra BKPM Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Arah kebijakan pertama : peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs);
- b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- c. Meningkatkan efektivitas kerjasama penanaman modal;
- d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal;

- e. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal;
 - f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Arah kebijakan kedua : peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020 – 2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja;
- b. Meningkatkan produktivitas penanaman modal;
- c. Meningkatkan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;
- d. Meningkatkan daya saing dan akses pasar;
- e. Meningkatkan penanaman modal pada industry yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor;
- f. Meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan

memiliki dampak sosial yang besar;

g. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya alam di dalam negeri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah **"Mewujudkan Purwakarta Istimewa"**. Visi tersebut menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Visi tersebut ditunjang oleh beberapa misi, salah satu misi yang pelaksanaannya didukung oleh DPMPTSP adalah Misi Keempat yaitu Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa dengan Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagaimana dapat dilihat dari gambaran keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah terpilih dengan Tugas, Pokok dan Fungsi DPMPTSP di bawah ini :



Gambar 3.1

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Tupoksi Perangkat Daerah

Tujuan adalah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 pada Misi Keempat yaitu:

Tujuan: Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif

Indikator Tujuan: Laju pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut DPMPTSP menetapkan sasaran yaitu :

Sasaran Kesatu:

Meningkatnya pertumbuhan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Indikator: Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN

Sasaran Kedua:

Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal.

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disamping mempertimbangkan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang / Forum Perangkat Daerah, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
- b. Pencapaian MDGs dan IPM;
- c. Perkembangan teknologi informasi;
- d. Kebijakan Pusat dan Provinsi;
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
- f. Rencana Aksi MCP Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan komponen penunjang keberhasilan pembangunan tersebut akan dilaksanakan melalui Program yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dengan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Purwakarta dan RENSTRA DPMPSTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dimana program dan kegiatan Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator kinerja program : Jumlah Minat Penanaman Modal.

Kelompok sasaran program : Seluruh pelaku usaha PMA dan PMDN.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :

- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Indikator kinerja program : Jumlah Promosi Penanaman Modal dan Diselenggarakan.

Kelompok sasaran program : Seluruh Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator kinerja program : Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan dan Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Kelompok sasaran : Seluruh Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator kinerja program : Persentase PMA dan PMDN yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala.

Kelompok sasaran : Pelaku Usaha PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator kinerja program : Persentase Data dan Informasi yang Dimutakhirkan.

Kelompok sasaran : Seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program : Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran.

Kelompok sasaran : Seluruh Unit Kerja di Internal Perangkat Daerah.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dan dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program.

Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Tabel 4.1

Matriks Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				16.518.837.885			32.546.000.000
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.493.837.885	APBD		14.453.000.000
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Kab.Purwakarta	100%	90.000.000	APBD		97.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Kab.Purwakarta	100%	20.000.000	APBD		21.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	10.000.000	APBD	100%	11.000.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	60.000.000	APBD	100%	65.000.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	8.638.837.885	APBD	100%	9.022.000.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	8.618.837.885	APBD	100%	9.000.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	10.000.000	APBD	100%	11.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	10.000.000	APBD	100%	11.000.000	
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	30.000.000	APBD	100%	33.000.000	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	-	APBD	100%	-	

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	30.000.000	APBD	100%	33.000.000
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	400.000.000	APBD	100%	340.000.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	150.000.000	APBD	100%	75.000.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	150.000.000	APBD	100%	160.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kab. Purwakarta	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	100.000.000	APBD	100%	105.000.000	
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	795.000.000	APBD	100%	833.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	50.000.000	APBD	100%	53.000.000	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	60.000.000	APBD	100%	63.000.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	250.000.000	APBD	100%	260.000.000	

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	100.000.000	APBD	100%	105.000.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	10.000.000	APBD	100%	10.000.000
6	Fasilitas Kunjungan Tamu (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	100.000.000	APBD	100%	105.000.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	100.000.000	APBD	100%	105.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	25.000.000	APBD	100%	27.000.000	
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	100.000.000	APBD	100%	105.000.000	
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	1.000.000.000	APBD	100%	410.000.000	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	500.000.000	APBD	100%	100.000.000-	
2	Pengadaan Mebel(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	200.000.000	APBD	100%	210.000.000	

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	300.000.000 <i>350.000.000</i>	APBD	100%	100.000.000
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	2.710.000.000	APBD	100%	2.841.000.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	10.000.000	APBD	100%	11.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	700.000.000 <i>600.000.000</i>	APBD	100%	730.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	2.000.000.000	APBD	100%	2.100.000.000
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	830.000.000	APBD	100%	877.000.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	150.000.000	APBD	100%	160.000.000
2	Pemeliharaan Mebel(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	30.000.000	APBD	100%	32.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	100.000.000	APBD	100%	105.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	400.000.000	APBD	100%	420.000.000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	150.000.000	APBD	100%	160.000.000	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				300.000.000	APBD		155.000.000	
A	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab. Purwakarta	100%	200.000.000	APBD	100%	50.000.000	

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab. Purwakarta	100%	200.000.000 <i>140.000.000</i>	APBD	100%	50.000.000	
B	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	10 Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab. Purwakarta	100%	100.000.000	APBD	100%	105.000.000	
1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab. Purwakarta	100%	100.000.000	APBD	100%	105.000.000	
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				400.000.000	APBD		260.000.000	
A	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11 Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab. Purwakarta	100%	400.000.000	APBD	100%	260.000.000	
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab. Purwakarta	100%	200.000.000	APBD	100%	50.000.000	
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab. Purwakarta	100%	200.000.000	APBD	100%	210.000.000	
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				525.000.000	APBD		555.000.000	

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target
A	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	12 Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	100%	525.000.000 <i>270.000.000</i>	APBD	100%	555.000.000
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	100%	300.000.000	APBD	100%	315.000.000
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	100%	75.000.000	APBD	100%	80.000.000
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	100%	100.000.000	APBD	100%	105.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab.Purwakarta	100%	50.000.000 <i>10.000.000</i>	APBD	100%	55.000.000
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				400.000.000	APBD		430.000.000
A	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13	Kab.Purwakarta	100%	400.000.000	APBD	100%	430.000.000
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab.Purwakarta	100%	50.000.000	DAK	100%	55.000.000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab.Purwakarta	100%	250.000.000	DAK	100%	270.000.000
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab.Purwakarta	100%	100.000.000	DAK	100%	105.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				400.000.000 226.818.000	APBD		420.000.000
A	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14 Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Kab.Purwakarta	100%	400.000.000 226.818.000	APBD		420.000.000
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Kab.Purwakarta	100%	400.000.000	APBD		420.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				400.000.000	APBD		
A	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14 Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Kab.Purwakarta	100%	400.000.000	APBD	100%	420.000.000
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Kab.Purwakarta	100%	400.000.000	APBD	100%	420.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. Pencapaian atas Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 dalam meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN tercapai 116% dan dalam meningkatnya kualitas pelayanan perizinan tercapai 104%, namun ada beberapa elemen dalam indikator tersebut yang belum maksimal. Untuk itu perlu adanya evaluasi atas hasil capaian indikator tersebut melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha dan calon investor di Kabupaten Purwakarta.

Komitmen dan dukungan dari seluruh pihak di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sangat diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta guna terwujudnya sinergitas kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan di atasnya. Harapan kami semoga Renja Tahun 2023 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan good governance dan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT

NIP. 19790605 200501 1 013

KESESUAIAN DENGAN RKPD TAHUN 2023

Tabel 2.46
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penanaman Modal di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2019 – 2021

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Realisasi			Tingkat Capaian (%)	Perangkat Daerah
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penanaman Modal								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								
	1 Jumlah Buku Promosi Potensi Unggulan Daerah	Set	1,00	1,00	-	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 Jumlah Buku Peluang Potensi Investasi	Set	1,00	1,00	-	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	3 Jumlah peran Serta Pada Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri	Event	3,00	3,00	-	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1 Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	90,00	90,00	-	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 Jumlah Dokumen Datad dan Laporan Investasi Yang Akurat	Jumlah	1,00	1,00	-	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Prosentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Persen	10,16	10,16	-	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1 Persentase Kepastian dan Ketepatan Biaya Pelayanan Perizinan	Persen	100,00	100,00	-	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 Persentase Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	80,00	80,00	-	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	3 Persentase Peningkatan Proses Pengolahan Pelayanan Administrasi Perizinan	Persen	95,00	95,00	-	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	4 Persentase Target Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan	Persen	100,00	100,00	-	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	5 Persentase Peningkatan Sistem Informasi dan Pengembangan Database Pelayanan Perizinan	Persen	100,00	100,00	-	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1 Jumlah Buku Promosi Investasi	Buku	3,00	-	1,00	-	33,33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 Jumlah Keikutsertaan Pada Pameran Investasi	Event	11,00	-	1,00	-	9,09	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program Perbaikan Iklim Investasi								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	1	Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	Persentase Perusahaan Yang Mendapat Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	3	Persentase Pengaduan Perizinan	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	4	Peningkatan Nilai IKM	Persen	80,75	-	85,59	-	105,99	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu		Persentase Jumlah Izin Yang Dapat Diselesaikan	Persen	80,00	-	80,00	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan							dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	244,50	-	-	87,78	35,90	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Jumlah Minat Penanaman Modal	Investor	1.130,00	-	-	305,00	26,99	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal		Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Event	22,00	-	-	5,00	22,73	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	%	300,00	-	-	89,00	29,67	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	%	295,00	-	-	99,00	33,56	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi		Persentase Kesesuaian Regulasi PTSP Pusat dan Daerah	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1	Persentase Jumlah	%	285,00	-	-	100,00	35,09	Dinas Penanaman Modal